

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Program yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah kecamatan adalah kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan maupun Desa dalam hal pelayanan penerbitan dan pengesahan SPPHAT pada masyarakat. standar pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat adalah tentang kepedulian Pemerintah Kecamatan Popayato Barat sebab sesuai hasil penelitian bahwa kinerja pelayanan pada Masyarakat khususnya pelayanan tentang SPPHAT belum optimal.

Pembinaan aparatur sangat penting dalam meningkatkan kualitas kerja aparatur dalam pelayanan SPPHAT di Kecamatan Popayato Barat dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Kecamatan tersebut belum berjalan secara optimal terhadap pelayanan SPPHAT dikarenakan sikap para aparatur Kecamatan yang masih apatis dan bergantung atau menggantungkan kepada atasan dengan kata lain menunggu perintah langsung.

#### 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan, penerapan system pelayanan dalam hal ini SPPHAT dan pembinaan harus secara terprogram dan berkelanjutan bagi seluruh aparatur Kecamatan

Popayato Barat sangat dibutuhkan berupa pendidikan dan pelatihan serta pembinaan mental baik dari pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten agar kualitas aparatur akan lebih produktif dalam menjalankan tugas administrasi dan dalam melayani masyarakat.

2. Diharapkan Agar para aparatur Kecamatan hendaknya dapat mengoptimalkan waktu kerja agar pekerjaan yang tidak ada, tidak menumpuk dan berbagai permasalahan dapat terselesaikna dengan efisien dan efektif, hubungan kerja berbagai pihak agar terstruktur dan tetap terkoordinasi dengan sebaik mungkin.

Pembinaan hendaknya ditambah agar kualitasnya semakin nyata karena aparatur Kecamatan saat ini mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Denny J Visi Indonesia Baru , Jakarta. Jaya Baya Universitas Press  
1997
- Arif siful, Kapitalisme Birokrasi, Jogjakarta LKIS 2001
- Arikunto, Suharsimi.2008 Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Blau Peter M dan Meyer W. Marshal W. Birokrasi dala Masyarakat  
Modern Jakarta Prestasi Pustaka Raya 2000.
- Bateman, Heather and Katy McAdam.2003 Dictionary of Human  
Resources and Persinnel Management. Third Edition London: A & C  
Black Publishers Ltd.
- Forbes, Melisa; Carolyn J Hiil and Lourence E.Lynn Jr.2006. “Public  
Management and Government Performance: An International Reviuw” In  
Boyne, George A, Kenneth J Apriler, Laurence J. O’toole Jr and Richard  
M. Walker. (editet) Public service performance: Perspektive on  
Measurement and management .Page 254-274. Cambridge:University  
Press.
- Widodo Erna dan Muhtar. Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif  
Jogjakarta Avyrouz 2002
- Widjaja A.W Administrasi Kepegawaian (suatu Pengantar) CV Rajawali,  
Jakarta. 1986

Sumber lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“**UU No.5/1960**”);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (“**PP NO.63/1963**”);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha (“**HGU**”), Hak Guna Bangunan (“**HGB**”) Dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (“**HP**”);
4. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“**PP No.40/1997**”);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orangt Asing (“**PP No.41/1996**”); dan

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (“**InMenAg No.2 tahun 1999**”);

- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, wawasan Kerja Aparatur Negara “Materi Penataran” Jakarta 1993.
- Profil Kecamatan Popayato barat kabupaten Pohuwato.

**Lampiran. 1**

**Hasil wawancara dengan Camat Popayato Barat.**

**Tabel Hasil wawancara**

<b>PEDOMAN WAWANCARA KEPADA CAMAT POPAYATO BARAT</b>	
Hari/Tgl	: Kamis 2 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Kantor Camat Popayato Barat
Interview	: Drs. Zairin TD Maksud
Jabatan	: Camat
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
1.	Untuk memperoleh Gambaran Umum tentang tugas pokok Camat
2.	Untuk memperoleh gambaran kondisi aparat kecamatan dalam hal pelayanan SPPHAT Pada Masyarakat.
3.	Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam pelayanan SPPHAT

**PERTANYAAN**

1. Bagaimana kedudukan dan tugas pokok camat?
2. Bagaimana kondisi aparat dikecamatan Popayato Barat dalam hal pelayanan SPPHAT.
3. Faktor-Faktor Apa saja yang menghambat dalam hal pengurusan SPPHAT

KODE	Pertanyaan	Transkrip wawancara Camat popayoto Barat
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana kedudukan dan tugas pokok camat
	Jawaban	kedudukan dan tugas Camat lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi potensi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, serta memperhatikan 10 Prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Penerapan fungsi manajemen adalah sangat penting dalam system manajerial suatu organisasi baik itu organisasi formal maupun non formal khususnya pada kantor Camat Popayato Barat,

		<p>hal ini di karenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sebagai fungsi untuk menilai dan mengukur akuntabilitas kinerja aparatur</li><li>b. Sebagai fungsi pembanding antara hasil dengan standar yang ditentukan sekaligus memperbaikinya apabila tidak ada kesesuaian dengan apa yang diharapkan.</li><li>c. Meminimalisir tingkat kesalahan yang mungkin terjadi baik dari faktor manusia maupun dari alat kerja yang digunakan.</li><li>d. Sebagai fungsi dalam menjaga dan mengembangkan moral dan etika birokrasi pemerintah yang sesuai dengan norma-norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul> <p>Hal inilah yang terus dibina dilingkungan Pemerintah Kecamatan Popayato Barat sebab tanpa keempat hal inilah maka manajemen dalam suatu organisasi akan sulit berjalan sehingga tujuan-tujuan organisasi yang kita harapkan akan sulit tercapai.</p>
--	--	---

	Pertanyaan 2.	2. Bagaimana kondisi aparat dikecamatan Popayato Barat dalam hal pelayanan SPPHAT.
	Jawaban	- Masih bergantung pada pimpinan, dalam hal ini Camat.
	Pertanyaan 3.	Faktor-Faktor Apa saja yang menghambat masyarakat dalam hal pengurusan SPPHAT
	Jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam menerapkan tugas kewajiban yang di bebaskan untuk dijalankan sebagaimana mestinya</li> <li>2. Sikap apatis aparat, masih ada sebagian aparat yang acuh tak acuh atau memandang remeh terhadap pelaksanaan pengawasan sehingga dapat memberikan pengaruh negative terhadap aparat lainnya serta masyarakat pengguna layanan.</li> <li>3. Ketergantungan bawahan terhadap atasan.  Masih ada sebagian aparat yang terlalu</li> </ol>



		<p>bergantung kepada atasan karena atasan adalah segalanya, semua terserah atasan atau hanya menunggu perintah sehingga menimbulkan dampak terhadap aparat yang kaku dan tidak kreatif.</p> <p>Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan surat pernyataan penyerahn hak atas tanah( SPPHAT) tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman apatratur terhadap Pelayanan SPPHAT tersebut sehingga masih banyak aparat tersebut bersikap apatis (masa bodo) terhadap pelayana tersebut.</li> <li>2. Sikap apatis Aparat</li> </ol> <p>Masih adanya sikap apatis, acuh tak acuh atas pelayanan SPPHAT sehingga tidak disiplin, padahal sudah diberikan bimbingan teknis bahkan pelatihan-pelatihan yang berkenan dengan pelayana SPPHAT kepada aparat yang</p>
--	--	--

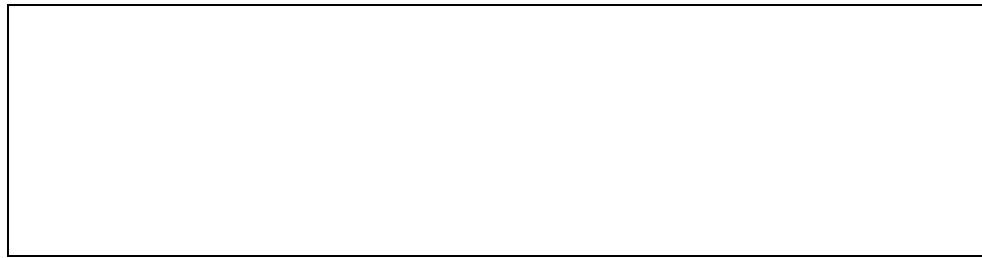
		<p>bersangkutan karena hal ini akan memberikan dampak negative terhadap aparaturnya.</p> <p>3. Ketergantungan terhadap atasan</p> <p>Masih ada sebagian aparat yang bergantung pada atasannya karena atasan adalah segalanya (panutan), semuanya terserah atasan atau hanya menunggu perintah sehingga menimbulkan aparat yang kaku dan tidak kreatif.</p> <p>4. Adanya hubungan kekeluargaan yang ada diantara para staf sehingga dalam pelayanan SPPHAT masih banyak aparat yang tidak disiplin waktu, dan hanya berharap kebijakan dari atasannya terhadap sanksi yang akan diterapkan.</p>
--	--	--

## Lampiran. 2

### Hasil wawancara dengan Seksi Pemerintahan

**Tabel Hasil wawancara**

<b>PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SEKSI PEMERINTAHAN</b>	
Hari/Tgl	: Kamis 2 Februari 2012
Pukul	: 12.30 s/d 13.30
Tempat	: Kantor camat Popayato Barat
Interview	: Samsuddin. SIp
Jabatan	: Kasi Pemerintahan
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
1. Untuk memperoleh Gambaran Umum tentang tugas pokok kasi pemerintahan	
2. Untuk memperoleh gambaran kondisi penataan Struktur dalam hal pelayanan SPPHAT Pada Masyarakat.	
<b>PERTANYAAN</b>	
1. Bagaimana kedudukan dan tugas pokok kasi pemerintahan?	
2. Bagaimana kondisipenataan Struktur aparat dikecamatan Popayato Barat dalam hal pelayanan SPPHAT.	



<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara kasi pemerintahan
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana kedudukan dan tugas pokok kasi pemerintahan?
	Jawaban	Seksi pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrarian, pembinaan social politik dalam negeri, administrsi kependudukan, serta pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan
	Pertanyaan 2.	Bagaimana kondisi penataan Struktur aparat dikecamatan Popayato Barat dalam hal pelayanan SPPHAT.
	Jawaban	Mengenai realisasi pelaksanaannya dilapangan dalam hal ini Bidang Pemerintahan Umum telah mengupayakan penataan Struktur Oranisasi

		<p>Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Pemerintah di tingkat Desa, yang sampai dengan saat ini belum menunjukkan kemajuan yang sangat berarti meskipun sudah dilakukan pembinaan- pembinaan teknis maupun non teknis yang kami hadapi. Namun atas arahan dan bimbingan dari Bapak Camat maka permasalahan-permasalahan belum dapat teratasi. Pada dasarnya kami sudah melaksanakan realisasinya secara maksimal dan menyeluruh.</p>
--	--	--

### Lampiran. 3

#### Hasil Wawancara dengan Seksi Pelayanan Umum

<b>PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SEKSI PEMERINTAHAN</b>		
Hari/Tgl : Kamis 2 Februari 2012		
Pukul : 12. 30 s/d 13.30		
Tempat : Kantor camat Popayato Barat		
Interview : Moh. Raji.SHI		
Jabatan : Kasi Pelayana Umum		
Obyek : Presedur Mekanisme Pelayanan		
Wawancara		
<b>TUJUAN</b>		
1. Untuk memperoleh Gambaran Umum tentang Program pembangunan di bidang Pelayanan Umum Khususnya SPPHAT		
<b>PERTANYAAN</b>		
1. Bagaimana kedudukan dan tugas pokok kasi pelayanan Umum dalam hal Pelayanan SPPHAT Terhadap Masyarakat.		
<b>KODE</b>		Wawancara
	Pertanyaan 1.	1. Bagaimana kedudukan dan tugas pokok kasi pelayanan Umum

		dalam hal Pelayanan SPPHAT Terhadap Masyarakat.
	Jawaban	Bahwa Program pembangunan di bidang Pelayanan Umum yang meliputi Pendataan, Penataan Lingkungan pada Kantor Camat dan Desa telah diupayakan dengan baik tetapi masih belum maksimal, sedangkan pelayanan prima oleh aparat Kecamatan juga telah dilaksanakan meskipun pelaksanaannya terdapat banyak tantangan dan kendala yang dijumpai seperti : Faktor SDM, minimnya Fasilitas maupun Anggaran, yang perlu dipecahkan bersama-sama.

#### **Lampiran. 4**

#### **Hasil Wawancara dengan beberapa Staf antara lain sebagian Pegawai dan Honor di Kecamatan Popayato Barat.**

Informan ini berpendidikan SLTA dengan Pangkat Golongan III/a, dan tenaga honor dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2012 dengan para informan dapat disimpulkan sebagai berikut : secara umum penerapan dan penilaian kinerja di Kantor Camat Popayato Barat sudah baik hal ini dapat dilihat dari :

<b>PEDOMAN WAWANCARA KEPADA CAMAT POPAYATO BARAT</b>	
Hari/Tgl	: Jum'at 3 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Kantor camat Popayato Barat
Interview	: Aparat Kecamatan Popayato Barat
Jabatan	: Staf Dan Honorer
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
Untuk mengetahui Program kerja dari palayanan SPPHAT.	



**PERTANYAAN**

1. Bagaimana Program kerja dari pelayanan?
2. Bagaimana Produktivitas dan kinerja setiap aparat dalam melayani kepentingan masyarakat SPPHAT
3. Pengawasan terhadap moral dan etika aparat

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara Camat popayoto Barat
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaiman Program kerja dari pelayanan?
	Jawaban	1. Berbagai Program kerja dari pelayanan, Penyusunan, dan realisasi sampai dengan Evaluasi Program kerja oleh Seksi-Seksi yang ada, dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik kepada Camat sebagai Pimpinan, walaupun hambatannya masih minimnya sarana dan Prasarana yang belum memadai yang ada di Kecamatan Popayato Barat.
	Pertanyaan 2.	Bagaimana Produktivitas dan kinerja setiap aparat dalam melayani kepentingan masyarakat

		SPPHAT.
	Jawaban	Produktivitas dan kinerja setiap aparat dalam melayani kepentingan masyarakat adalah prioritas utama terus dipantau oleh pimpinan, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak aparat yang bergantung pada perintah Pimpinan (asal Pimpinan ada) namun pada dasarnya hal ini mulai dibenahi oleh unsur Pimpinan
	Pertanyaan 3.	Pengawasan terhadap moral dan etika aparat
	Jawaban	Pengawasan terhadap moral dan etika aparat Kecamatan Popayato Barat selalu dipantau oleh Pimpinan. Dari penilaian kami sebagai bawahan bahwa Camat telah mengoptimalkan segala upaya pelaksanaan tugas-tugasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan telah meletakkan dasar-dasar tugas pokoknya sebagai Camat, akan tetapi sikap aparat yang acuh tak acuh dengan pekerjaannya.

## Lampiran.5

Pedoman dan hasil wawancara kepala desa

### 1. Desa Tunas jaya

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Kamis 2 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Tunas jaya
Interview	: Lukman
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.</li><li>2. Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.</li><li>3. Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR</li></ol>	

**PERTANYAAN**

1. Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.
2. Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.
3. Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya.mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih sekitar 80%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 192 pekarangan, yang memiliki

		SPPHAT baru 38 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 289 Ha. yang memiliki SPPHAT bru 48 Ha.
	Pertanyaan 2.	Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.
	Jawaban	Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap

		<p>awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemerintahan yang selama ini bermasalah di masyarakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada..</p>
--	--	---

## 2. Desa Butungale

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Selasa 14 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Tunas Butungale
Interview	: Kismat Wakiden
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
1.Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.	
2.Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.	
3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR	
<b>PERTANYAAN</b>	
1)Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.	
2)Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat	

secepatnya memiliki SPPHAT.

3. Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya. mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih sekitar 74%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 211 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 76 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 563 Ha. yang memiliki SPPHAT baru 89 Ha.
	Pertanyaan	Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan



	2.	agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.
	Jawaban	Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah

		<p>masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemerintahan yang selama ini bermasalah di masyarakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada.</p>
--	--	--

### 3. Desa Dudeulo

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Kamis 16 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa dudeolo
Interview	: Ucu lamadupa
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
<p>1. Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.</p> <p>2. Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.</p>	

<p>3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR</p>
<p><b>PERTANYAAN</b></p> <p>1.Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.</p> <p>2.Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.</p> <p>3.Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif</p>

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya.mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih

		<p>sekitar 78%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 493 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 95 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 571 Ha. yang memiliki SPPHAT bru 101 Ha.</p>
	<p>Pertanyaan 2.</p>	<p>Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..</p>
	<p>Jawaban</p>	<p>Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa</p>
	<p>Pertanyaan 3.</p>	<p>Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.</p>

	Jawaban	<p>Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemerintahan yang selama ini bermasalah di masyarakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada.</p>
--	---------	--

#### 4. Desa Padengo

<b>5. PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Jum'at 17 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Padengo
Interview	: Ibrahim Biki
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
1.Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.	
2.Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.	
3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR	
<b>PERTANYAAN</b>	
1.Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.	
2.Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.	

3. Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

KODE	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya. mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih sekitar 79%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 258 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 89 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 435 Ha. yang memiliki SPPHAT baru 93 Ha.
	Pertanyaan	Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan

	2.	agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.
	Jawaban	Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah



		<p>masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemerintahan yang selama ini bermasalah di masyarakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada.</p>
--	--	--

**5.Desas Persatuan**

<b>6. PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Senin 20 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Padengo
Interview	: Syahrin Raji
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
<p>1.Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.</p> <p>2.Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.</p>	

3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan

KAUR

**PERTANYAAN**

1.Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.

2.Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.

3.Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya.mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih

		<p>sekitar 75%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 303 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 98 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 513 Ha. yang memiliki SPPHAT bru 98 Ha.</p>
	<p>Pertanyaan 2.</p>	<p>Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..</p>
	<p>Jawaban</p>	<p>Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.</p>
	<p>Pertanyaan 3.</p>	<p>Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.</p>

	Jawaban	<p>Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemerintahan yang selama ini bermasalah di masyarakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada.</p>
--	---------	--

## 6. Desa Molosifat

<b>7. PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Senin 20 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Molosifat
Interview	: Andi Baso masulili
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan

Wawancara

**TUJUAN**

- 1.Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.
- 2.Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.
- 3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR

**PERTANYAAN**

- 1.Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.
- 2.Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.
- 3.Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di

	1.	desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya.mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih sekitar 68%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 297 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 58 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 348 Ha. yang memiliki SPPHAT bru 87 Ha.
	Pertanyaan 2.	Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memeng belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab

		pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.
	Jawaban	Mengenai pembinaan dan bimbingan saya sebagai penanggung jawab terhadap aparat setiap awal bulan pada bulan berjalan saya mengadakan evaluasi tentang tufoksi masing-masing aparat namun pada hasil evaluasi yang Nampak dan selalu ada pertentangan adalah masalah pelayanan tentang kebutuhan masyarakat dan yang selalu saya bina adalah tanggung jawab KAUR pemrintahan yang selama ini bermasalah di masyrakat yakni tentang SPPHAT yang data dan berkasnya sudah di terima namun relisasinya belum ada.

## 7.Molosifat utara

<b>8. PEDOMAN WAWANCARA</b>	
Hari/Tgl	: Selasa 21 Februari 2012
Pukul	: 09.00 s/d 10.45
Tempat	: Desa Molisifat Utara
Interview	: Ismail Talib
Jabatan	: Kepala Desa
Obyek	: Presedur Mekanisme Pelayanan
Wawancara	
<b>TUJUAN</b>	
1.Untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah lahan masyarakat yang belum memiliki SPHHAT.	
2.Untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian KAUR terhadap pelayanan SPPHAT.	
3.Untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan dan bimbingan KAUR	
<b>PERTANYAAN</b>	
1Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT.	
2.Bagaimana kepedulian KAUR pemerintahan agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT.	



3. Bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat di desa bapak akan lebih efektif

KODE	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Bagaimana dengan jumlah lahan masyarakat di desa bapak yang belum memiliki SPPHAT
	Jawaban	Terima kasih atas kesempatan bapak. Sebagai peneliti telah mengambil kesempatan pada kami untuk mencari informasi tentang keadaan lahan di desa saya. mengenai jumlah lahan yang belum memiliki SPPHAT di desa kami adalah masih sekitar 79%. Dari jumlah lahan pekarangan sebanyak 299 pekarangan, yang memiliki SPPHAT baru 81 pekarangan. Lahan pertanian yang jumlahnya 671 Ha. yang memiliki SPPHAT baru 78 Ha.
	Pertanyaan	Bagaimana Kepedulian KAUR pemerintahan

	2.	agar lahan masyarakat secepatnya memiliki SPPHAT..
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana pembinaan dan bimbingan bapak terhadap KAUR pemerintahan agar pelayanan SPPHAT kepada masyarakat lebih efektif.
	Jawaban	Menyangkut kepedulian KAUR pemerintahan di desa saya khususnya pelayanan SPPHAT pada masyarakat memang belum sesuai dengan apa yang di harapkan, ini di sebabkan oleh KAUR pemerintahan tidak memahami apa yang sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya sebab

		pada pelayanan ini KAUR pemerintahan hanya menyerahkan sepenuhnya pada Sekertaris Desa.
--	--	---

**Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat**

<b>9. PEDOMAN WAWANCARA</b>		
Hari/Tgl : Kamis 23 Februari 2012		
Pukul : 09.00 s/d 10.45		
Tempat : Desa Tunas Jaya		
Interview : Umar Hasan		
Jabatan : Kepala Desa		
Obyek : Presedur Mekanisme Pelayanan Wawancara		
<b>KODE</b>	Pertanyaan	Transkrip wawancara
		Wawancara
	Pertanyaan 1.	Apakah Lahan – lahan masyarakat sudah memiliki SPPHAT.
	Jawaban	Terimakasih Pak. Kalau menyangkut lahan saya sebagai tokoh masyarakat mengetahui tentang keadaan lahan yang belum memiliki SPPHAT. Di Desa saya sebagian besar belum memiliki SPPHAT baik lahan pertanian maupun

		<p>pekarangan. Dari pihak Pertanahan sudah sering turun kedesa – desa mendata lahan – lahan yang belum memiliki SPPHAT dan sertifikat kami sangat puas dengan perhatian pihak Pertanahan namun sampai dengan saat ini realisasinya tetap tidak ada hal ini sering saya koordinasikan dengan Pemerintah dan aparat desa tentang realisasi dari Pertanahan namun jawaban beliau-beliau adalah kalau SPPHAT itu adalah pemerintah Desa yang membuat dan yang mengesahkan adalah Camat hal ini pula yang membuat kami resah bagaimana kinerja aparatur tentang pelayanan kepada kami khususnya pelayanan SPPHAT yang sampai saat ini belum efektif.</p>
	Pertanyaan 2.	Apakah Bapak belum pernah bermohon kepada Pemerintah untuk mendapatkan SPPHAT
	Jawaban	Sudah Pak. Usulan – usulan dan permohonan kami sudah serahkan di Desa namun realisasinya belum ada. Data pendukung dan administrasi lainnya kami sudah penuhi namun hasilnya tetap

		belum ada.
	Pertanyaan 3.	Bagaimana sifat – sifat aparat dan Pemerintah tentang pelayanan SPPHAT yang sudah diusulkan namun belum ada realisasinya
	Jawaban	saya sudah menemui aparat dan pemerintah Desa dan Kecamatan untuk mengkoordinasikan usulan dan permohonan kami, namun yang kami temui adalah ada aparat yang acuh tak acuh dengan apa yang kami butuhkan dan kami koordinasikan, ada jawaban dari aparat bahwa data tidak lengkap, bahkan ada jawaban bahwa lahan lahan dan tanah yang diusulkan untuk mendapatkan SPPHAT ada sengketa. Inilah alasan – alasan dan sikap – sikap yang kami temui pada Aparat dan Pemerintah yang ada di Desa dan Kecamatan.

PNS sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam organisasi Pemerintah pembinaannya SDM-nya dimungkinkan secara formal dilakukan melalui jabatan struktural dan fungsional. Sesuai dengan PP 100 Tahun 2000, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Secara tegas jabatan struktural merupakan suatu jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi bagi PNS yang memiliki potensi dominan untuk memimpin.

Sedangkan pengertian jabatan fungsional PNS menurut PP No. 16 Tahun 1994 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Secara tegas dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional merupakan suatu jabatan yang tidak tampak dalam struktur organisasi tapi fungsinya diperlukan organisasi bagi PNS yang dinilai mempunyai potensi yang profesional.

Professional tidak pernah lepas dari kata kompetensi, sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh sumber daya manusia, terutama bagi aparatur

Negara, khususnya aparatur di bidang pelayanan. Di berbagai belahan dunia, saat ini menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya isu globalisasi. Salah satu persyaratan menghadapi tantangan globalisasi adalah kompetensi. Tentunya sumber daya manusia di Indonesia akan bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara luar, termasuk sumber daya manusia di bidang pelayanan, dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga bisa menjadi tenaga yang professional sesuai dengan bidang keahliannya.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN atau yang lebih populer dengan istilah "Good Governance". Untuk semua itu, bagi Pemerintah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme Aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan memberikan pelayanan prima.

Untuk membangun sosok Aparatur sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah perlu membina aparatur secara terus menerus dengan jelas, terarah, transparan dan sebagai salah satu jalur adalah melalui Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan melalui adanya diklat-diklat dan pelatihan teknis. Dengan pola karier yang jelas, terarah,

transparan dan kemampuan teknis akan dapat merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalisme.

Tak dapat dipungkiri, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan, karena pendidikan dan pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan mencapai tujuan organisasi, baik pemerintah maupun swasta.

Menjadikan aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di pemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam ketugasan pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal.

Alur pikir pengembangan kapasitas aparatur atau untuk lebih lengkapnya kita sebut sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas atau capacity building aparatur pemerintah daerah akan lebih mengena apabila diawali dari inventarisasi permasalahan kaitannya dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh



para pengguna jasa layanan pemerintah daerah, diantaranya adalah kemudahan dalam berbagai pengurusan kepentingan, tidak membedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain, perlakuan yang adil, jujur, transparan dan wajar. Dari inventarisasi permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan akan didapatkan standar atau ukuran tingkat kepuasan masyarakat minimal yang diinginkan.

Bertolak dari hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemecahan permasalahan dengan menggunakan metoda-metoda analisis manajemen. Di dalam manajemen terpadu aparatur hanyalah salah satu bagian saja di dalam sistem atau ruang lingkup di pemerintah daerah, sehingga faktor-faktor lain di luar aparatur itu sendiri perlu direspon sebagai bahan pertimbangan.

Menurut H.A.S. Moenir (2002) ada 6 (enam) faktor pendukung dalam pelayanan umum, yaitu:

1. Kesadaran, yaitu suatu proses berpikir melalui metoda renungan pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.

2. Faktor Aturan, merupakan sesuatu yang harus di buat dan di patuhi sehingga dapat mencapai sasaran yang di inginkan.
3. Faktor Organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana sistem dan prosedur serta metodanya.
4. Faktor Pendapatan, yaitu seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan
6. Faktor Sarana Pelayanan, meliputi sarana kerja dan fasilitas pelayanan.

Ke enam faktor tersebut mempunyai bobot yang sama kecuali faktor kesadaran yang berbobot lebih tinggi dari yang lain. Menurut Stephen R. Covey (1994) kesadaran diri dapat dipisahkan menjadi diri sendiri yaitu sikap dan perilaku kita sendiri serta bagaimana cara kita melihat diri sendiri dan orang lain atau disebut juga dengan istilah paradigma diri sendiri. Cara pandang kepada orang lain sering tanpa sadar memberikan hasil yang berlainan dengan kenyataannya, memproyeksikan maksud kita pada perilaku mereka (orang lain). Hal tersebut sangat membatasi potensi dan kemampuan pribadi untuk dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga seorang aparatur harus selalu

melakukan recheck atau pencermatan kembali terhadap paradigmanya apakah paradigma diri pribadi mereka sudah didasarkan atas realitas atau prinsip atau hanya merupakan fungsi dari pengkondisian dan kondisi yang diciptakan sendiri akibat penafsiran yang salah terhadap cara pandang orang lain kepada dirinya. Untuk mempercepat proses kesadaran diri diperlukan langkah awal yang mendasar dan penting yaitu perubahan paradigma. Cara pandang dalam mengupayakan persamaan persepsi, pengertian serta penafsiran antara diri pribadi dengan dunia luar atau orang lain akan membawa dampak pada sikap, perilaku serta hubungan kita dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan negatif lama yang terkumpul menjadi satu sehingga menumbuhkan karakter atau citra diri aparatur yang negatif, dengan langkah program yang pasti perlu diupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Keberadaan mereka diakui dan diberdayakan secara optimal, hal ini memang diperlukan suatu proses panjang dan komitmen bersama untuk dapat mencapai citra diri positif aparatur yang sangat kita harapkan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan program pengembangan sumber daya manusia aparatur, dimana mulai dari proses recruitment, reinforcement sampai pada proses retaining. Dari beberapa tahapan tersebut diharapkan akan diperoleh hasil pengembangan sumber daya manusia aparatur yang memenuhi tuntutan aparatur itu sendiri,

dimana secara umum yang diharapkan dari mereka adalah keseimbangan antara kepuasan dalam bekerja (job satisfaction) dengan kepuasan dalam hidup (life satisfaction). Dengan eksistensi mereka diakui, kesejahteraan diperhatikan, akan berdampak pada komitmen yang semakin menguat dan rasa loyalitas para aparatur kepada pemerintah daerah menjadi bertambah.

Hasil analisis manajemen yang merupakan upaya pendekatan pada pemecahan masalah, dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen yang terpadu dan berkelanjutan. Antar lembaga dalam pemerintahan daerah bersatu padu dalam melaksanakan serta mengembangkan program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dengan suka rela melepaskan ego sektoral. Pembentukan komitmen secara bersama yang disertai dengan peningkatan daya tanggap atau responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan akan barang dan jasa para “users”, dilaksanakan dengan etos kerja serta budaya kerja yang setiap saat diupayakan ada peningkatan untuk kepentingan bersama, sehingga terbentuk suatu team kerja yang saling mengisi dan saling membutuhkan. Kebersamaan antar sumber daya aparatur dalam setiap lembaga pemerintahan dalam upaya peningkatan kinerja diperlukan untuk membentuk suatu team dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya manajemen terpadu dan berkelanjutan, pembentukan komitmen dan daya tanggap serta pembentukan team dalam kerangka pengembangan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, antara lain adalah dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah daerah untuk mendapatkan kemampuan aparatur secara optimal. Peluang dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal dibuka lebar-lebar, kemudian pada akhirnya diberdayakan secara profesional dalam arti pendidikan yang telah diperoleh diberikan kesempatan untuk dapat diaplikasikan dalam ketugasannya.

.Decision maker dalam kebijakannya diharapkan dapat memberikan ruang atau skala prioritas pertama dalam hal pengembangan sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya manusia yang ada di wilayah pemerintah daerah setempat. Fakta, realitas serta data menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, dan sudah menjadi kenyataan bahwa dunia pendidikan dan pelatihan SDM yang terabaikan akan berakibat krisis multidimensional yang belum juga kunjung reda sampai pada saat ini masih dialami oleh Bangsa Indonesia, dalam

dunia pendidikan harus diakui kita semakin tertinggal dari dunia internasional. Maju tidaknya suatu wilayah sangat ditentukan oleh mutu serta kualitas SDM yang dimiliki. Pola pikir global, kepercayaan dan toleransi menjadi falsafah utama dalam pengembangan SDM. Apabila hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi dengan landasan komitmen bersama untuk introspeksi diri kemudian melakukan perubahan segera, maka tidak mustahil masyarakat sejahtera adil dan makmur yang sementara ini hanya sebatas visi saja akan segera dapat tercapai.